

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Blitar

Brigifa Kustiningrum^{1✉}, Arisyahidin², Eka Askafi³
(1,2,3) Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri

✉ Corresponding author
(ifa51080@gmail.com)

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dan sekolah dari TK/Paud di wilayah Kota Blitar. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer. Data Sekunder dari Wawancara (Guru dan staf sekolah inklusi, Kepala sekolah, Siswa dengan kebutuhan khusus, Orang tua siswa), observasi. Sedangkan data primer dari dokumen (Kebijakan pendidikan inklusi, Laporan Implementasi), studi literatur (Artikel penelitian sebelumnya. Buku, jurnal, dan literatur terkait). Jumlah informan dalam penelitian ini 6 orang. Metode analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah Individualized Educational Programs (IEP) merupakan pendekatan yang memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi. Selain program akademik, maka untuk mencapai tujuan institusional yang komprehensif sangatlah dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang memadai sehingga dapat menjadikan peserta didik dapat mencapai kematangan personal, sosial, dan karir. Sekolah inklusi merupakan program sekolah yang diselenggarakan dengan mencampur anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dengan anak normal dalam kelas reguler. Di TKN Kota Blitar semua ABK yang masuk dalam kelas reguler mengikuti proses pembelajaran seperti biasa tanpa ada perbedaan..

Kata Kunci: *Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Implementasi, Kebijakan Pendidikan Inklusi*

Abstract

Education is an important aspect and a priority in human life. The purpose of this research is to determine the implementation of inclusive education policies in Blitar City. This research uses a qualitative approach. The research location is the Blitar City Education Office and kindergarten/preschool schools in the Blitar City area. Data sources are taken from secondary and primary data. Secondary Data from Interviews (Inclusive school teachers and staff, school principals, students with special needs, parents), observations. Meanwhile, primary data comes from documents (Inclusive education policy, Implementation Report), literature studies (Previous research articles, books, journals and related literature). The number of informants in this study was 6 people. Data analysis method using qualitative analysis. The research results are that Individualized Educational Programs (IEP) is an approach that has high relevance and effectiveness. Apart from academic programs, to achieve comprehensive institutional goals, adequate guidance and counseling services are needed so that students can achieve personal, social and career maturity. Inclusion schools are school programs that are organized by mixing children with special needs (ABK) with normal children in regular classes. At TKN Blitar City, all ABK who are enrolled in regular classes follow the learning process as usual without any differences.

Keyword: *Children with Special Needs (ABK), Implementation, Inclusive Education Policy*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Pendidikan juga memegang sebuah peranan penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan negara. Pendidikan merupakan pondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan berdampak positif bagi berlangsungnya pembangunan, yang merupakan langkah penting tercapainya tujuan negara.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar kepada sektor pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang sedikit. Menurut data yang dimiliki PBB seperti dikutip oleh Hikmawati dan Rusmiyati (2011:17-32), pada tahun 2010, terdapat 12% penyandang cacat dari jumlah populasi penduduk di dunia atau sekitar 650 juta jiwa adalah penyandang cacat, dimana hampir 25% dari jumlah tersebut atau sekitar 163 juta orang adalah anak usia sekolah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada survey Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah penyandang cacat terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Besarnya angka penyandang difabilitas di Indonesia tersebut menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak para penyandang difabilitas tersebut sebagai seorang warga negara. Pendidikan inklusi merupakan suatu system layanan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (1) yang menegaskan "setiap warga berhak mendapatkan Pendidikan", Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (2) yang menegaskan "setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menegaskan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu". Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya Pendidikan inklusi di tengah Masyarakat.

Pendidikan inklusif perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan Inklusif sebagai layanan Pendidikan yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar bersama anak normal (Non-ABK) usia sebayanya dalam satu kelas yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus MENERIMA/mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Kebijakan Pendidikan inklusi adalah untuk pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan Pendidikan yang setara dan layak bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Prinsip dasar dari kebijakan Pendidikan inklusi adalah mengintegrasikan siswa-siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan Pendidikan yang umum, sehingga mereka dapat belajar Bersama dengan teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas. Tujuan utama kebijakan ini adalah mempromosikan kesetaraan, partisipasi, dan kemajuan Pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terutama pendidikan inklusif. Hal tersebut salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan adanya layanan pendidikan khusus yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kota Blitar. Semenjak disahkannya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, pemerintah daerah Kota Blitar melalui Dinas Pendidikan segera mengambil langkah nyata guna melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Permendiknas tersebut. Salah satunya adalah dengan menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah piloting inklusif dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Kondisi saat ini di Kota Blitar belum ada payung hukum yang mengatur tentang Pendidikan Inklusif. Sekolah yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan berkebutuhan khusus. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan regular. Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum siap untuk menangani anak-anak dikelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Tenaga pendidik dan Kependidikan yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Blitar.

Berikut adalah gap peneliti dari penelitian terdahulu \membedakan pendekatan pendidikan inklusif dari masa lalu hingga saat ini:

Tabel 1 Gap Penelitian

Peneliti	Tahun	Temuan Utama	Perbandingan dengan Penelitian di Kota Blitar
Danny Ontario Rusmono	2020	Pendidikan inklusif di Indonesia menghadapi banyak masalah, termasuk kebijakan kepala sekolah, hubungan antara guru dan siswa, serta kurangnya kemampuan guru dalam menjalankan program inklusif. Optimasi program dapat dilakukan melalui pelatihan ko-guru dan pelatihan penciptaan lingkungan belajar yang ramah inklusif. Pihak sekolah dan orang tua juga perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang program inklusif.	Kedua penelitian fokus pada pentingnya pelatihan guru dan kerjasama antar stakeholder, namun penelitian di Blitar lebih mendalam dalam mengelola dan mendokumentasikan kegiatan, serta evaluasi kebijakan pendidikan inklusi.
Majelis Rena Tobasa et al.	2024	Menyajikan analisis mendetail tantangan dan strategi dalam mendisiplinkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Temuan menunjukkan kompleksitas dan perlunya pemahaman mendalam serta kerjasama antara pendidik, staf sekolah, orang tua, dan komunitas. Strategi yang diusulkan mencakup pendekatan yang sensitif, responsif, dan kolaboratif.	Penelitian di Blitar juga menekankan pada kerjasama lintas stakeholder dan pendekatan kualitatif, namun lebih fokus pada implementasi kebijakan dan evaluasi praktisnya di lapangan, termasuk rekrutmen dan penempatan peserta didik.
Ratna Sari Wulandari	2021	Kompetensi pedagogik guru di sekolah inklusi di Indonesia tergolong rendah, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang beragam, kurangnya pemahaman tentang karakteristik siswa, dan kesulitan dalam mengevaluasi proses belajar siswa. Hasil penelitian menyarankan perlunya peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik ini.	Penelitian di Blitar memperkuat temuan ini dengan menunjukkan penerapan praktis dari pelatihan dan rekrutmen guru, serta mendokumentasikan secara kualitatif proses evaluasi dan implementasi program di lapangan.
Septi Wulandari, Suprpti, Drajat Tri Kartono	2021	Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah pendidikan inklusif dapat menggantikan sekolah khusus dan sejauh mana layanan ini memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk pendidikan khusus sebagai fasilitas awal bagi anak dengan disabilitas sebelum mereka mengikuti pendidikan di sekolah inklusif.	Sama-sama mengeksplorasi efektivitas pendidikan inklusif, namun penelitian di Blitar lebih spesifik dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi proses dan kebijakan pendidikan inklusi di tingkat lokal dengan pendekatan kualitatif.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penelitian di Kota Blitar mengambil pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi dan evaluasi pendidikan inklusi, menekankan pada pentingnya kerjasama antar stakeholder dan evaluasi praktis kebijakan di lapangan. Hal ini berbanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya fokus pada tantangan dan kebutuhan pelatihan guru dalam konteks yang lebih luas di Indonesia. Penelitian di Blitar memberikan insight yang lebih mendalam tentang manajemen pendidikan inklusi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi, serta mendokumentasikan kegiatan secara rinci, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan dan praktek pendidikan inklusi. Ini mengindikasikan bahwa penelitian di Blitar mungkin berkontribusi signifikan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus secara efektif di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk mengukur variabel dan menjelaskan hubungan antar variabel. Metode ini cenderung menekankan pada generalisasi, pengujian teori, serta membuat generalisasi terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, serta membuat generalisasi terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti (Nugroho & Umanto, 2017) data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi dan analisis dokumen kebijakan terkait. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema dan pola dari wawancara dan dokumen, serta membandingkan temuan dengan tujuan dan kerangka konseptual penelitian. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dan sekolah dari TK/Paud di wilayah Kota Blitar. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa bagaimana kebijakan Pendidikan Inklusi: Evaluasi Implementasi dan tantangan dalam konteks sistem pendidikan inklusi di wilayah Kota Blitar. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer. Data Sekunder dari Wawancara (Guru dan staf sekolah inklusi, Kepala sekolah, Siswa dengan kebutuhan khusus, Orang tua siswa), observasi. Sedangkan data primer dari dokumen (Kebijakan pendidikan inklusi, Laporan Implementasi), studi literatur (Artikel penelitian sebelumnya. Buku, jurnal, dan literatur terkait). Jumlah informan dalam penelitian ini 6 orang, metode analisis data dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk mengukur variabel dan menjelaskan hubungan antar variabel. Metode ini cenderung menekankan pada generalisasi, pengujian teori, serta membuat generalisasi terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, serta membuat generalisasi terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti (Nugroho & Umanto, 2017) data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi dan analisis dokumen kebijakan terkait. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema dan pola dari wawancara dan dokumen, serta membandingkan temuan dengan tujuan dan kerangka konseptual penelitian. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendidikan Kota Blitar dan sekolah dari TK/Paud di wilayah Kota Blitar. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa bagaimana kebijakan Pendidikan Inklusi: Evaluasi Implementasi dan tantangan dalam konteks sistem pendidikan inklusi di wilayah Kota Blitar. Sumber data diambil dari data sekunder dan primer. Data Sekunder dari Wawancara (Guru dan staf sekolah inklusi, Kepala sekolah, Siswa dengan kebutuhan khusus, Orang tua siswa), observasi. Sedangkan data primer dari dokumen (Kebijakan pendidikan inklusi, Laporan Implementasi), studi literatur (Artikel penelitian sebelumnya. Buku, jurnal, dan literatur terkait). Jumlah informan dalam penelitian ini 6 orang, metode analisis data dengan analisis kualitatif.

Lingkungan pendidikan inklusi, manajemen sekolah inklusi merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan pendidikan inklusi, pengorganisasian pendidikan inklusi, pengelolaan pendidikan inklusi, serta evaluasi pendidikan inklusi

1. Perencanaan

Perencanaan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di TKN Kota Blitar meliputi: (1) menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima; (2) merencanakan program untuk peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd selaku kepala Sekolah TKN Karangsari dalam wawancara sebagai berikut:

"Dalam perencanaan peserta didik di Sekolah inklusi, harus menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima, termasuk menentukan kuota ABK. Setelah itu kita menyiapkan program kegiatan untuk peserta didik baru."

Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd juga menambahkan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan peserta didik.

"Yang terlibat dalam perencanaan adalah Kepala Sekolah, guru, dan komite sekolah."

Dwi Astutik, S.Pd selaku koordinator inklusi memberikan pernyataan yang sama dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut:

"Perencanaan awal yang dilakukan adalah menentukan jumlah peserta didik yang diterima di Sekolah ini. Selama ini kita menampung 3 peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus kelas A ada 2 siswa dengan gangguan ADHD dan Slow Learner dan kelas B dengan gangguan Speace Delay.. Tapi kalau melebihi dari batas kuota yang telah ditentukan sebelumnya kita harus minta izin dulu ke Dinas pendidikan untuk mendapatkan perizinan penambahan kuota sambil melampirkan assessment dari psikolog, biasanya seperti itu. Yang melakukan perencanaan itu adalah kepala Sekolah, guru, dan komite sekolah. Jadi dalam

perencanaan kita menimbang kondisi sekolah dan sumber daya pendukung pembelajaran, terutama untuk ABK nya kan kita harus mempersiapkan GPK dan sumber belajar yang memadai. Jadi kita perkirakan dengan kondisi sekolah seperti ini mempunyai menampung berapa peserta didik. Selain itu kita juga merencanakan program kegiatan untuk peserta didik baru setelah diterima.

Pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd dan Dwi Astutik, S.Pd diperkuat dengan pernyataan Katinah sebagai berikut

“Perencanaan peserta didik yang dilakukan sejak awal sebelum tahun ajaran baru dengan menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima, untuk kuota ABK biasanya 4 peserta didik setiap tahunnya, jadi tidak boleh melebihi itu. Harus izin dulu ke Dinas pendidikan kalau melebihi kuota yang ditentukan. Setelah itu juga direncanakan program kegiatan untuk peserta didik baru.”

Dari pernyataan ketiga partisipan di atas menunjukkan perencanaan peserta didik di TKN Kota Blitar meliputi penentuan kuota peserta didik dalam tiap rombongan belajar, dengan kuota 4 peserta didik berkebutuhan khusus dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu menentukan program kegiatan untuk peserta didik baru.

2. Pengorganisasian sekolah Inklusi

Pengorganisasian peserta didik, TKN Kota Blitar melaksanakan empat kegiatan yang dilakukan sebelum peserta didik diterima sebagai peserta didik sampai peserta didik diterima di TKN Kota Blitar, berikut diantaranya:

a. Rekrutmen/penerimaan peserta didik

Kegiatan dalam rekrutmen/penerimaan peserta didik di TKN Kota Blitar pada umumnya sama seperti sekolah reguler pada umumnya meliputi (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi semua unsur mulai dari kepala Sekolah, guru, tenaga TU, dan komite sekolah, (2) menentukan persyaratan calon peserta didik baru, (3) pembuatan dan pemasangan informasi PPDB, (4) pelaksanaan pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ali Suprayitna, S.Pd sebagai sebagai berikut:

“Dalam rekrutmen/penerimaan peserta didik baru, yang pertama adalah membentuk kepanitiaan PPDB mbak. Dalam pembentukan kepanitiaan tersebut berdasarkan keputusan kepala Sekolah yang berwenang. Dalam susunan kepanitiaan ditentukan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang melibatkan semua unsur dari guru, dan TU. Saya sebagai penanggungjawab. Pembuatan dan pemasangan pengumuman juga disesuaikan dengan peraturan yang berdasarkan keputusan kepala Sekolah. Untuk pendaftarannya kami buka dalam dua gelombang dengan waktu lebih awal. Untuk promosi, kita memasang banner bertuliskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus namun dengan kuota terbatas.”

Pernyataan Ali Suprayitna, S.Pd di atas, diperkuat dengan hasil wawancara kepada Dinin Sugiati, S.Pd sebagai Kepala Sekolah TKN Ngadirejo yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kita sebar brosur ke warga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah saat mendekati penerimaan peserta didik baru. Kita juga memasang banner di tempat umum sebagai ajang promosi dari sekolah. Pada brosur dan banner tertulis bahwa sekolah kami menerima PDBK dengan kuota terbatas. Hal pertama yang dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru kami tim PPDB. Dalam tim tersebut terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang melibatkan unsur guru dan TU.”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses rekrutmen/penerimaan peserta didik di TKN Kota Blitar dengan melakukan pembentukan panitia PPDB. Pembentukan panitia tersebut melibatkan semua unsur pendidik dan tenaga kependidikan di TKN Kota Blitar termasuk kepala Sekolah. Panitia yang terbentuk tersebut terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pembuatan dan pemasangan pengumuman pendaftaran disesuaikan dengan keputusan kepala Sekolah Sedangkan untuk promosi sekolah memasang banner dan juga menyebarkan brosur ke warga masyarakat yang berada di lingkungan Sekolah. Hal tersebut diperkuat oleh hasil studi dokumentasi yang didapatkan dari brosur profil sekolah. Dalam brosur tersebut tampak jelas tertulis bahwa TKN Kota Blitar memberikan informasi tentang pendaftaran yang terdiri dari dua gelombang, persyaratan calon peserta didik, hingga informasi bahwa TKN Kota Blitar menerima PDBK dengan kuota terbatas. Selain itu dari studi dokumentasi juga didapatkan surat keputusan kepala Sekolah tentang susunan panitia PPDB TKN Kota Blitar Tahun Pelajaran 2023/2024 yang di dalamnya terbentuk susunan panitia PPDB mulai dari penanggungjawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, serta anggota yang terdiri dari koordinator humas, koordinator konsumsi, koordinator seragam, dan koordinator

perengkapan.

Persyaratan calon peserta didik baru di TKN Kota Blitar berdasarkan brosur yang didapatkan peneliti dari hasil dokumentasi meliputi persyaratan administrasi sebagai berikut: (1) menyerahkan foto copy Kartu Keluarga, (2) menyerahkan foto copy akte kelahiran, (3) menyerahkan foto copy KTP ayah dan ibu. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd.

"Untuk persyaratan calon peserta didik baru ABK itu sama seperti sekolah pada umumnya dengan melengkapi dokumen administrasi seperti fotocopy Kartu Keluarga, KIA. foto copy akte kelahiran"

Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd juga menambahkan persyaratan lain terkait usia peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 1 Tahun 2021, syarat minimum usia masuk TK Negeri untuk calon peserta didik yakni: Paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A

Paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B."

Ali Suprayitna, S.Pd juga memberikan pernyataan yang sama dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut:

"Kalau anak sudah masuk usia 4 mau 5 tahun sudah bisa diterima, sedangkan untuk anak ABK kita tidak membatasi batas usia maksimal 5 tahun seperti anak-anak pada umumnya. Untuk syarat lain sama seperti sekolah reguler lainnya yaitu melengkapi persyaratan administrasi."

Pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd dan Ali Suprayitna, S.Pd diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dinin Sugati, S.Pd selaku Kepala Sekolah TKN Ngadirejo terkait penerimaan ABK

"Persyaratan calon peserta didik disini itu harus memenuhi persyaratan administrasi, lalu usianya minimal 4 tahun dan maksimal 5 tahun. Kalau usia dibawah 4 tahun harus melampirkan surat dari psikologi. Untuk ABK sama seperti peserta didik pada umumnya yaitu melengkapi persyaratan administrasi, namun untuk ABK tidak ada syarat batas usia maksimal 5 tahun.."

Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara di atas diketahui bahwa persyaratan calon peserta didik untuk anak ABK sama saja dengan peserta didik pada umumnya, hanya saja untuk ABK tidak diberikan batasan usia maksimal seperti anak-anak pada umumnya yang diberikan batasan usia maksimal 5 tahun.

Prosedur pendaftaran di TKN Kota Blitar sama seperti sekolah reguler pada umumnya meliputi (1) pengambilan formulir, (2) pengisian formulir, (3) pengembalian formulir beserta persyaratannya seperti fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan Akte Kelahiran peserta didik, (4) pendaftaran ulang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Katinah

"Pendaftaran peserta didik baru disini pada umumnya sama seperti sekolah reguler. Mulai dari pengambilan formulir, pengisian formulir, lalu pengembalian formulir ke sekolah. Untuk ABK prosedurnya juga sama. Karena kita di awal itu tidak tau yang masuk kesini itu berpotensi ABK atau tidak. Jadi semua diterima berdasarkan prosedur yang ada sesuai pemenuhankuota."

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Watini, S.Pd sebagai Kepala Sekolah di TKN Pakunden.

"Untuk pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus sama seperti peserta didik pada umumnya mulai dari pengambilan formulir, pengisian formulir, dan pengembalian formulir beserta dokumen administrasi yang harus dilengkapi. Disini itu penerimaannya berdasarkan siapa yang paling awal mendaftar sampai kuota terpenuhi."

Pernyataan Watini, S.Pd diperkuat oleh pernyataan Ali Suprayitna, S.Pd sebagai Kepala Sekolah di TKN Karangtengah yang ikut terlibat dalam proses penerimaan peserta didik.

"Untuk pendaftaran anak ABK sama seperti peserta didik pada umumnya, pertama ngambil formulir, kemudian pengembalian formulir ke sekolah beserta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi meliputi foto copy KTP orangtua, foto copy Kartu Keluarga, dan foto copy akte kelahiran"

Selain hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil dokumentasi berupa formulir pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2023/2024, untuk ABK ditambahkan/dilampirkan hasil assessment peserta didik jika ada.

b. Seleksi peserta didik

Seleksi peserta didik yang dilakukan di TKN Kota Blitar hanya berdasarkan persyaratan administrasi dan tidak terdapat seleksi akademik. Seleksi yang dimaksud meliputi seleksi kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan dengan usia peserta didik minimal 4-5 tahun dengan batas usia maksimal 5 tahun. Seleksi pada ABK sama seperti peserta didik pada umumnya namun tidak terdapat batas usia maksimal 5 tahun. Selain itu juga tidak ada persyaratan untuk menyerahkan hasil assessment seperti di sekolah inklusi tingkat SMP/MTs atau SMA/MA, kecuali jika peserta didik sudah memiliki hasil assessment maka pihak sekolah tinggal melakukan proses assessment lanjutan yang dilakukan oleh psikolog profesional. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut

"Pada saat ini seleksi yang dilakukan di TKN Kota Blitar hanya berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi usia. Termasuk untuk anak ABK, jadi kita menerima setiap anak yang mendaftar berdasarkan pemenuhan kuota."

Selaras dengan pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd, Dwi Astutik, S.Pd memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Seleksi hanya berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan usia peserta didik yang mencukupi.."

Pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd dan Dwi Astutik, S.Pd diperkuat dengan pernyataan Katinah sebagai berikut:

"Disini tidak ada seleksi akademik mungkin hanya seleksi administrasi, jadi kita ngeceki kelengkapan dokumen administrasi yang kita minta ke orangtua peserta didik seperti foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP, fotocopy akte kelahiran dan kita juga ngecek usia peserta didik berdasarkan akte kelahirannya karena ada batas usia minimal 4-5 tahun dan usia maksimal 5 tahun untuk peserta didik pada umumnya. Sedangkan untuk ABK tidak ada batas usia 5 tahun. Semua yang daftar diterima sampai kuota terpenuhi."

Dari hasil wawancara terhadap informan di atas dapat diketahui bahwa di TKN Kota Blitar tidak diberlakukan seleksi akademik hanya berdasarkan seleksi administrasi. Seleksi yang dimaksud lebih kepada kelengkapan dokumen administrasi dan pemenuhan persyaratan berdasarkan usia minimal dan maksimal.. Hal ini juga diperkuat oleh hasil dokumentasi pada brosur TKN Kota Blitar yang mencantumkan persyaratan pendaftaran berupa pengisian formulir dan kelengkapan dokumen administrasi yaitu KTP orangtua, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran calon peserta didik. Untuk anak berkebutuhan khusus tidak ada batasan usia maksimal seperti yang diberlakukan untuk anak-anak pada umumnya. Penerimaan peserta didik lebih ditekankan pada pemenuhan kuota yang telah ditentukan TKN Kota Blitar

c. **Orientasi peserta didik**

Pelaksanaan orientasi peserta didik di TKN Kota Blitar antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya sama, tetapi ABK tetap didampingi guru. Pelaksanaan orientasi peserta didik di TKN Kota Blitar meliputi pengenalan lingkungan Sekolah, tata tertib dan kedisiplinan, serta pengenalan pendidik dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Pelaksanaan orientasi disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd yang menyatakan sebagai berikut.

"Saat awal masuk dilakukan masa orientasi seperti sekolah reguler pada umumnya. Orientasi dilakukan setiap awal masuk selama 3 hari sebelum memulai hari efektif pembelajaran, tapi karena memang ini masih di TK jadi paling ya kita cuma kenalkan lingkungan Sekolah kita dan juga kita kenalkan pada bapak dan ibu guru yang ada di TKN Kota Blitar. Untuk peserta didik ABK yang saat orientasi sudah bisa terlihat hambatan, dan hambatan tersebut kompleks maka kita akan mendampingi peserta didik tersebut."

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Watini, S.Pd sebagai berikut:

"orientasi dilakukan juga disini. Peserta didik pada umumnya dijadikan satu dengan ABK supaya dapat saling bersosialisasi. Kegiatan ini untuk mengenalkan peserta didik baru dengan lingkungan Sekolah pada peserta didik baru. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari di awal masuk sekolah. Di hari ketiga tersebut kita biasanya ada ritual lepas balon sebagai tanda bahwa anak-anak sudah resmi menjadi peserta didik di TKN Kota Blitar."

Dinin Sugjati, S.Pd juga memberikan pernyataan yang selaras dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd dan Watini, S.Pd sebagai berikut:

"Kita juga mengadakan masa orientasi meskipun kita masih jenjang TK. Kurang lebih

sama seperti di sekolah lainnya yaitu pengenalan lingkungan Sekolah serta pengenalan pada guru-guru yang ada disini. orientasi dilakukan selama 3 hari, termasuk kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendampingankhusus kita harus dampingi agar tidak sampai mengganggu temannya yang lain. Di hari terakhir kita ajak peserta didik bersama-sama melepas balon sebagai tanda akhir orientasi mereka.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan masa orientasi peserta didik di TKN Kota Blitar antara ABK dengan peserta didik pada umumnya sama. Orientasi ini dilakukan agar ABK dapat bersosialisasi dengan peserta didik lainnya. Peserta didik berkebutuhan khusus di TKN Kota Blitar belum terdeteksi sejak dari awal pendaftaran, semua diterima tanpa mengetahui latar belakang peserta didik. Oleh sebab itu di hari terakhir orientasi dilakukan tes psikologi untuk semua peserta didik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut:

“Di hari ketiga orientasi, kami mendatangkan psikolog untuk melakukan tes psikologi secara klasikal. Sebelum di tes psikologi, orangtua murid harus mengisi daftar riwayat hidup peserta didik yang bersangkutan. Anak-anak yang teridentifikasi beresiko inklusi akan ditandai hasil tesnya untuk kemudian di tes secara khusus dengan alat pendeteksi tersendiri. Setelah hasil keluar, wali murid diundang dan hasil tes di sosialisasikan oleh psikolog. Orangtua murid yang beresiko ABK dipanggil tersendiri setelah acara untuk diberikan pengertian tentang hasil tes peserta didik kemudian akan diminta untuk berpartisipasi pada prosedur selanjutnya yaitu tahap identifikasi, assessment, dan assessment lanjutan.

Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd juga menambahkan bahwa anak-anak yang terdeteksi memiliki hambatan tidak boleh langsung di judge sebagai anak ABK setelah melaksanakan tes psikologi serta tahap identifikasi dan assessment, mereka akan terlebih dahulu dibina dalam klinik pintar, seperti pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut

“Sebelum di judge sebagai anak ABK, setelah beberapa prosedur seperti tes psikologi, identifikasi, dan assessment selesai, anak tersebut dimasukkan dalam klinik pintar. Jadi di dalam klinik tersebut anak-anak yang beresiko ABK dibina terlebih dahulu selama dua bulan. Jika dalam dua bulan tidak ada perubahan dan kemajuan yang spesifik, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak ABK dan akan dibina oleh GPK. Tetapi jika dalam pembinaan anak tersebut sudah mampu, maka anak tersebut bisa mengikuti kelas klasikal sama seperti anak-anak pada umumnya.”

Pernyataan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd didukung oleh pernyataan dari Ali Suprayitna, S.Pd sebagai berikut:

“Dalam tes psikologi, hasil dari tes psikologi tersebut yang menjelaskan juga psikolognya. Setelah anak terdeteksi memiliki potensi inklusi, orangtuanya akan dipanggil menemui psikolog untuk dijelaskan tentang hasil tes beserta cara penanganan yang tepat. Dalam proses identifikasi dan assessment kita juga melibatkan guru dan orangtua peserta didik di dalamnya, tetapi dengan bimbingan psikolog yang bekerjasama dengan kami.”

Ali Suprayitna, S.Pd juga menambahkan pernyataan yang selaras dengan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd tentang mekanisme pelaksanaan tes psikologi sebagai berikut:

“Anak-anak diberikan tes psikologi semua, peserta didik yang terdeteksi inklusi diberikan alat pendeteksi khusus. Setelah hasil tes keluar kami langsung memanggil orangtua sekalian sosialisasi hasil psikolog oleh psikolognya. Semua wali murid dikumpulkan dulu, terus anak yang terdeteksi memiliki potensi ABK orangtuanya tidak boleh pulang dulu. Lebih tepatnya disendirikan untuk kemudian dikasih tau dari pihak sekolah dan psikolog tentang kondisi anaknya seperti ini serta bagaimana cara penanganannya. Setelah itu orangtua akan diminta membantu proses lanjutan setelah tes yaitu tahap identifikasi, assessment, dan assessment lanjutan. Setelah itu dimasukkan klinik pintar untuk pembinaan. Kalau di klinik mengalami kemajuan, mereka bisa dinyatakan mampu mengikuti pembelajaran secara klasikal dan tidak dikategorikan ABK lagi. Tetapi jika tidak mengalami kemajuan apapun, anak tersebut dikategorikan anak ABK dan harus dibina oleh GPK dengan kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual).”

Dapat diketahui bahwa setelah peserta didik ABK mengikuti tes dan terdeteksi memiliki potensi berkebutuhan khusus maka anak-anak tersebut akan menjalankan prosedur selanjutnya yaitu identifikasi, assessment, assessment lanjutan, kemudian dibina di klinik pintar selama dua bulan. Jika mengalami kemajuan pesat selama di klinik, anak tersebut akan terbebas dari kategori

ABK. Tetapi jika tidak mengalami perubahan, anak tersebut akan dibina khusus oleh GPK dengan menggunakan PPI (Program Pembelajaran Khusus). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Katinah berikut sebagai Kepala Sekolah di TKN Pembina Kepanjenkidul yang terlibat langsung dalam proses identifikasi, assessment, assessment lanjutan, serta menyusun PPI:

"Sebelum nge judge dia sebagai anak ABK, kita ada langkah-langkahnya yaitu melakukan identifikasi, isinya kita mengidentifikasi cara pendengarannya, cara penglihatannya, dll. Dari situ kita bisa mengetahui kelemahannya. Identifikasinya dengan cara wawancara pada orangtuanya. Jadi kita langsung mendatangi orangtuanya. Setelah itu assessment, yaitu mencari tahu data identitas anak, jadi kita menanyakan biodata anak, terus dimensi biologisnya, dia sering sakit apa tidak, sakitnya apa, sering mengeluh apa tidak. Data assessment ini juga didapat dari wawancara dengan orangtua. Jadi tidak semua anak diidentifikasi, sebelumnya sudah dilakukan tes psikologi, jadi setelah diketahui bahwa ada anak beresiko inklusi, berarti baru kita identifikasi. Misalkan ada yang beresiko inklusi, langsung kita persiapan identifikasi, assessment, mengundang orangtua, wawancara, setelah itu membuat deskripsi profil siswa, untuk kemudian dijadikan acuan dalam membuat PPI. Setelah assessment ada instrumen lanjutan, kita menanyakan kepada orangtua kenapa anak bisa beresiko ABK, misalkan dilihat dari daftar riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, serta tumbuh kembang anaknya. Yang tidak wawancara hanya deskripsi profil, itu tugas kita untuk mendeskripsikan hasil wawancara kepada orangtua, setelah itu masuk ke penyusunan PPI."

Watini, S.Pd juga menambahkan pernyataan tentang klinik pintar yang ada di TKN Kota Blitar sebagai berikut:

"Memang ada klinik pintar. Jadi itu dilakukan setiap pulang sekolah seperti les. Itu untuk semua peserta didik yang memiliki akademik lemah, jadi diberikan pembinaan khusus oleh wali kelasnya. Untuk anak ABK juga di klinik, kalau selama dua bulan sudah perkembangannya bagus dan sudah mampu seperti anak pada umumnya bisa lanjut ikut kelas klasikal tidak perlu PPI.."

Hasil wawancara di atas dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi berupa dokumen hasil tes psikologi, hasil tes identifikasi, hasil assessment, deskripsi profil, serta PPI peserta didik di TKN Kota Blitar Tahun Ajaran 2023/2024 yang secara keseluruhan berisikan tentang data pribadi peserta didik berkebutuhan khusus. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui bahwa setelah hasil tes psikologi keluar, dilanjutkan dengan wawancara kepada orangtua pada proses identifikasi dan assessment. Kemudian dilanjutkan deskripsi profil dan penyusunan PPI yang individual programnya disesuaikan dengan hasil identifikasi dan assessment peserta didik.

d. Penempatan peserta didik

Di TKN Kota Blitar penempatan peserta didik di dalam kelas diacak, termasuk untuk anak ABK setelah dipetakan juga diacak dengan jumlah masing-masing dua peserta didik dalam setiap kelasnya. Kecuali peserta didik berkebutuhan khusus dengan kebutuhan kompleks maka dalam setiap kelasnya hanya ditempatkan satu peserta didik saja. Seperti yang dikemukakan Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd dalam wawancara sebagai berikut

"Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus diacak dibagi dalam dua kelas. Untuk anak ABK yang memiliki kebutuhan kompleks, kami masukkan satu anak dalam setiap kelasnya supaya tidak kewalahan. Untuk anak ABK dengan kebutuhan ringan seperti slow learner, kita bisa masukkan setiap kelasnya dua orang karena wali kelasnya mampu meskipun tanpa GPK. Tapi sampai sekarang meskipun slow learner tiap kelasnya satu anak karena memang yang memiliki kekhususan slow learner hanya ada dua itupun di tingkatan kelas yang berbeda."

Dapat diketahui bahwa penempatan peserta didik ABK di TKN Kota Blitar terbagi dalam dua rombongan belajar. Tiap rombongan belajarnya disediakan dua kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan ringan dan satu kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan kompleks. Di TKN Kota Blitar peserta didik ABK nya ada 14 Siswa berkebutuhan khusus yang terbagi merata di enam sekolah TKN di kota Blitar dengan berbagai macam jenis yang tertuang dalam tabel 4.1.

Untuk pembinaan kemampuan dasar, anak-anak berkebutuhan khusus lebih sering ditempatkan di ruang sumber karena lebih menarik bagi anak berkebutuhan khusus dan juga banyak media belajar yang tersedia. Namun untuk anak kelas A masih belum bisa dibina di ruang sumber dan juga terpisah dari GPK, hal ini dikarenakan kondisi gedung TKN Kota Blitar yang jumlah ruangnya masih sedikit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Katinah dalam wawancara sebagai berikut:

“Peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan di dalam kelas seperti biasa. Dibagi dalam dua rombongan belajar. Sehingga tidak ada kelas secara khusus untuk anak ABK. Kecuali kalau mereka diberikan pembinaan oleh GPK nya memang sama beliau dibawa ke ruang sumber. Tetapi kadang ya GPK nya ikut menemani anak ABK di dalam kelas. Pembinaan ABK kelas A dan B sudah berjalan baik, meskipun sebenarnya masih kekurangan GPK. Untuk yg kelas A memang belum ada GPK, lagi mencari GPK, itu juga dicampur, jadi akhirnya yang ABK cenderung mengganggu, dan ngusilin temannya di dalam kelas, jadi marah tidak karu-karuan di kelas, dan pendendam, bahkan misalnya sekarang tengkarnya sampai dua hari tiga hari masih balas terus, jadi susah di situ karena juga belum ada GPK nya. Fokusnya susah, dan masih ingat terus sama masalahnya. GPK juga terpisah tempatnya, dan ruang sumber juga disana jadi susah. Ini rencananya di sini juga dibuatkan ruang sumber sendiri dan mencari GPK satu lagi.”

Pernyataan Katinah di atas diperkuat oleh pernyataan Dwi Astutik, S.Pd sebagai berikut:

“Pokoknya satu kelas reguler tidak boleh lebih dari dua ABK. Jadi misalnya di kelas A kita punya dua rombongan belajar terus ada dua ABK, satunya slow learner satunya lagi ADHD Kalau penempatan tempat duduk yang slow learner ditempatkan di duduk paling depan supaya bisa terpantau oleh guru kelasnya, sedangkan yang ADHD itu kan didampingi oleh GPK jadi dia duduk di belakang dan saya dampingi. Tapi selama ini mereka lebih nyaman di ruang sumber. Sudah beberapa bulan yang slow learner kelas A saya bina disini untuk mengasah kemampuan dasarnya.”

Untuk penempatan didalam kelas, anak berkebutuhan khusus ditempatkan di baris paling depan agar guru kelas dapat dengan mudah memberikan pendampingan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus selama proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung. Namun ketika anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan dari GPK nya maka ditempatkan di tempat yang paling belakang agar GPK dapat lebih fokus dalam mendampingi anak ABK tersebut tanpa terganggu peserta didik yang lainnya. Hal ini sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut:

Kalau di dalam kelas anak berkebutuhan khusus ditempatkan di tempat duduk barisan paling depan supaya guru kelasnya lebih mudah dalam memberikan pendampingan serta pengawasan terhadap peserta didik ketika KBM berlangsung. Kecuali ketika saya masuk ke dalam kelas untuk pendampingan yang anak ADHD itu saya pindahkan ke tempat duduk paling belakang agar lebih fokus dalam pendampingan”

Watini, S.Pd juga menambahkan pernyataan yang selaras dengan GPK Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd sebagai berikut:

“Saya selalu menempatkan mereka di tempat duduk yang paling dekat dengan saya. Selain dikarenakan di gedung yang ini belum ada GPK nya juga untuk lebih mempermudah saya dalam memberikan pendampingan serta pengawasan terhadap peserta didik tersebut.”

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Dinin Sugiyati, S.Pd selaku Kepala sekolah di TKN Ngadirejo sebagai berikut:

ABK tempatkan di barisan paling depan, tetapi tetap saya rolling. Sehingga setiap harinya itu dengan teman yang berbeda, jadi tidak bergantung pada satu anak saja. Saya tetap prioritaskan, agar saya bisa menjangkau dan tidak luput dari pengawasan serta bimbingan saya.

Namun dalam penempatan peserta didik berkebutuhan khusus, Ali Suprayitna, S.Pd memiliki pernyataan yang berbeda antara lain sebagai berikut:

“Rolling untuk tempat duduknya, dia tidak mau duduk di depan terus. Dia jenuh, jadi tidak pernah ada pembedaan di dalam kelas. Dia tetap rolling seperti teman-temannya yang lain. Kecuali kalau ada GPK nya dia ditempatkan paling belakang, Kalau pas nggondok ya tetap disini sama saya gak mau sama guru yang lain. Minta tugas ke saya, tapi tanpa mengganggu teman-temannya.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Ada yang ditempatkan di barisan paling depan untuk mempermudah pendampingan. Ada duduk berganti posisi setiap harinya sama seperti teman-temannya yang lain agar tidak jenuh. Anak berkebutuhan khusus merasa nyaman ketika ditempatkan di dalam kelas maupun belajar dengan GPK nya di ruang sumber belajar. Selain dari hasil wawancara, peneliti juga mengobservasi langsung penempatan di dalam kelas yang memang rata-rata peserta didik berkebutuhan khususnya ditempatkan di barisan paling depan dekat dengan tempat duduk

gurunya

e. **Evaluasi**

Kegiatan evaluasi peserta didik yang dilakukan di TKN Kota Blitar selama ini untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan peserta didik inklusi dalam proses pembelajaran. Bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan oleh pendidik di TKN Kota Blitar pada peserta didik diantaranya penilaian tertulis, penilaian sikap/perilaku, dan penilaian lisan termasuk pada ABK. Seperti yang dikemukakan oleh Katinah sebagai Kepala Sekolah di TKN Pembina Kepanjenkidul yang melakukan evaluasi pada peserta didik ABK sebagai berikut

Kita tetap melakukan penilaian kepada ABK, Penilaian saya berupa penilaian tertulis, lisan, dan sikap. Penilaiannya sama dengan anak-anak pada umumnya tetapi pendeskripsianya berbeda. Dalam penilaian tertulis soal-soal harus dibuat se kreatif mungkin bisa dibilang masih seperti memberikan soal pada anak TK seperti menebali, bernyanyi dan berhitung. Begitu juga dengan soal ujian juga dibuat beda disesuaikan dengan kemampuan peserta didik jadi memang kita turunkan indikatornya. Kita melakukan penilaiannya lebih fokus pada kemampuan dasarnya. Kita latih kemampuan dasar yang belum dikuasai ABK seperti membaca, bernyanyi, menulis, dan berhitung dasar. Nanti evaluasinya ya kita sesuaikan dengan kemampuan yang sudah bisa dia capai selama dibimbing. Kasian kalau dipaksakan. Sekolah inklusi kan bukan hanya terfokus untuk akademiknya, tapi bagaimana anak tersebut bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan teman sebaya pada umumnya biar tidak minder nantinya dan bisa hidup mandiri. Jadi kita tidak hanya fokus pada penilaian akademik tapi juga pada sikap, dan lisannya juga. Karena kita juga melatih sikap kemandirian, tanggungjawab, disiplin, dsb. seperti peserta didik pada umumnya. Nah hal itu juga menjadi penilaian kita untuk evaluasi akhir juga nanti dalam menaikkan ke tingkat kelas selanjutnya. Selain itu juga lisan, jadi kita memberikan latihan membaca, mengaji, dan juga latihan menjawab pertanyaan secara lisan. Kita terus memotivasi mereka.

Katinah juga menambahkan tentang kemajuan belajar peserta didik ABK sebagai berikut:

"Sekarang Alhamdulillah sudah mulai mandiri anak-anaknya baik secara sikap maupun dalam mengerjakan setiap lembar kerja harian maupun soal Ujian dari saya meskipun terkadang masih suka coret-coret untuk yang ADHD, kalau dulu sebelum dibimbing secara khusus masih coret-coret sesuka hati menebali saja tidak bisa tetapi kalau sekarang Alhamdulillah sudah mulai lemes tangannya tidak kaku lagi. Kalau yang slow learner kemajuannya sangat bagus. Sudah bisa berinteraksi dengan teman sekelasnya.

Mamik Sri Hartiningsih, S.Pd selaku kepala sekolah memberikan pendapat mengenai evaluasi peserta didik yakni.

Untuk penilaian peserta didik berkebutuhan khusus yang melaksanakan GPK nya. Penilaian lebih ditekankan pada penilaian sikap tentang kemandirian peserta didik . Alhamdulillah sekolah kita merupakan salah satu yang menerima atau menjadi sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus mendapatkan bimbingan semestinya sehingga kemajuannya sangat bagus sekali baik secara kemandirian maupun secara akademiknya. Yang dulunya masih sulit membaca Alhamdulillah sekarang selama mendapat bimbingan dari GPK sudah bisa, yang dulu masih suka marah-marah seenaknya sendiri sekarang sudah mau belajar dengan mandiri. Dan dengan peserta didik pada umumnya Alhamdulillah juga tidak pernah ada masalah, mereka bisa memahami kondisi temannya yang seperti itu

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ali Suprayitna, S.Pd yakni :

"untuk evaluasi dilakukan semua oleh GPK. Penilaiannya sama seperti anak pada umumnya, ya ada penilaian tertulis, lisan, dan sikap. Setiap harinya diberikan kegiatan belajar sebagai penugasan secara harian, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik ABK. Dibuat beda dari anak-anak pada umumnya, jadi dibuatkan soal sendiri. Tetapi fokus penilaian kita lebih ke kemandiriannya . Kalau untuk akademik kita tidak bisa memaksa. Tujuan kita lebih ke mendisiplinkan dan mengasah kemampuan dasar yang belum mereka kuasai seperti membaca dan menulis. Untuk penilaian secara lisan lebih kepada latihan membacanya, latihan mengaji, terus juga Tanya jawab sama GPK nya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa evaluasi peserta didik di TKN Kota Blitar dilakukan oleh GPK dengan bantuan guru kelas ABK. Evaluasi yang dilakukan diantaranya penilaian tertulis, penilaian sikap, dan penilaian lisan sama seperti peserta didik pada umumnya. Namun penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan peserta didik

berkebutuhan khusus. Di TKN Kota Blitar tidak menekankan penilaian pada aspek akademiknya saja, tetapi lebih kepada penilaian sikap yaitu kemajuan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus. Selain berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumentasi berupa lembar kerja untuk melakukan evaluasi pada peserta didik berkebutuhan khusus. Dari studi tersebut diketahui bahwa lembar kerja tersebut benar-benar disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Termasuk dalam memberikan tindak lanjut evaluasi yaitu ketika memberikan remedial kepada peserta didik jika peserta didik belum mampu mencapai nilai minimal yang diharapkan.

Hal ini sesuai pernyataan Katinah yakni

“Kalau untuk remedial saya tetap pakai. Kan saya juga pengennya anak-anak ABK juga mengalami kemajuan meskipun sedikit demi sedikit. Kalau misalnya pada lembar kerja masih belum bisa mengerjakan, saya rubah angka atau hurufnya, tetapi dengan tingkat kesulitan yang sama. Sampai peserta didik bisa mengerjakan dengan mandiri. Baru setelah itu saya beri pelatihan kemampuan dasar yang lain yang belum dikuasai oleh ABK. Begitu juga ketika mengerjakan soal tes, jika ABK belum memenuhi nilai minimal maka akan saya berikan remedial dengan tingkat kesulitan yang sama tetapi angka atau hurufnya berbeda”

Pernyataan ini di dukung oleh pernyataan Watini, S.Pd sebagai Kepala Sekolah di TKN Pakunden yakni.

“Ada remedial, jadi kalau lembar kerja yang pertama belum bisa, ya terus kita latih diberi lembar kerja lagi sampai bisa mengerjakan sendiri dengan mandiri. intinya memang harus sabar menjadi pendamping ABK itu. Termasuk dalam mengerjakan soal tes juga begitu, tetap diberi remedial kalau ABK belum bisa mengerjakan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini karena ada tindak lanjut berupa remedial yang disamakan dengan peserta didik pada umumnya jika peserta didik belum mencapai ketuntasan nilai minimal. Kemudian program perbaikan/remedial ini juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

SIMPULAN

Kurikulum atau program pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk juga anak berkebutuhan khusus akan memiliki efektivitas yang tinggi, manakala pada tataran implementasinya memiliki fleksibilitas sehingga dapat diterapkan bagi siapapun yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang unik. Dengan demikian Individualized Educational Programs (IEP) merupakan pendekatan yang memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi. Selain program akademik, maka untuk mencapai tujuan institusional yang komprehensif sangatlah dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang memadai sehingga dapat menjadikan peserta didik dapat mencapai kematangan personal, sosial, dan karir.

Sekolah inklusi merupakan program sekolah yang diselenggarakan dengan mencampur anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dengan anak normal dalam kelas reguler. Di TKN Kota Blitar semua ABK yang masuk dalam kelas reguler mengikuti proses pembelajaran seperti biasa tanpa ada perbedaan. Semua mata pelajaran yang sudah diprogramkan dalam kurikulum harus diikuti dan dipelajari ABK tanpa terkecuali. Baik Kompetensi Dasar sama, hanya tingkat kedalaman materinya yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kenali pihak-pihak yang membantu penelitian, terutama yang mendanai penelitian Anda secara finansial. Sertakan individu yang telah membantu Anda dalam studi Anda: Pembimbing, Pendukung keuangan, atau mungkin pendukung lain, misalnya Korektor, Pengetik, dan Pemasok, yang mungkin telah memberikan materi. Jangan menuliskan salah satu nama penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Mulyono (2003). Landasan Pendidikan inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LKPTK. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ardana, H. R. (2014). Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama PGRI Kecamatan Kasihan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arif Rohman. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Aspat (2016). Expert Teacher (Membedah Syarat-Syarat Untuk Menjadi Guru Ahli Atau Expert Teacher). Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol 3 No.1
- Badrudin. 2014. Manajemen Peserta Didik. Jakarta: PT Indeks
- Bakri, M. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Membangun Mental Toleran Berbasis Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 06 Malang.

- Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budiyanto. (2005) Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. Jakarta: Departemen Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal.
- Bustari, M., & Rahmawati, T. (2005). Manajemen Peserta Didik. Yogyakarta: FIP UNY.
- Dapa, A., Duyo, U., & Marentek, L. K. M. (2007). Manajemen Pendidikan Inklusif. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- David Wijaya (2018). Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Pedoman Khusus Penyelenggara pendidikan Inklusif. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas 2009. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2007). Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depdiknas. (2009). Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan memiliki potensi istimewa. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Luar Biasa. (2003). Pedoman Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (1996). Syaiful Bahri. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Elisa (2013). Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari Faktor Pembentuk Sikap. Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Vol. 2, No. 01, Februari 2013
- Fitriani (2017). Kompetensi Profesional Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Mts Muhammadiyah Banda Aceh. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan ISSN 2302-0156
- Imron, Ali. 2012. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar: Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar: Jakarta
- Kustawan (2013). Manajemen pendidikan inklusif (Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum & Kejuruan). Jakarta: Luxima.
- Kusuma (2017). MaEHaat Program Pendidikan Inklusi Untuk Aud. Jurnal Pendidikan Anak, Vol 6 Edisi 1
- Malawi, I., & Maruti, E. S. (2016). Evaluasi Pendidikan. CV. AE MEDIA GRAFIKA.
- Marthan, L. K. (2007). Manajemen pendidikan inklusif. Jakarta: Dirjen Dikti. Megawati (2012). Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Jurnal Formatif V o l . 2
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Permendikbud, (2013) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler. Jakarta
- Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Rahmawan, D. I. (2020,). Analisis Asesmen Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. In The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education (Vol. 1, pp. 47-62).
- Setianingsih (2017). Implementasi Pendidikan Inklusi: manajemen tenaga kependidikan..Jurnal Malih Peddas, Vol (2)
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah, S. (2007). INKLUSI: Pendidikan Untuk Semua. Jakarta Dep.Pendidik. dan Kebud. RI.
- Tarsidi, D. (2004). The Impelemntation of inclusive Education in Indonesia.
- Uhar Suharsaputra. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ulfah, A. D. (2016). Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. Jurnal Pasca UM, 4.
- UNESCP.1994.The Salamanca Statement and Framework for Acton on Sepcial Needs Education.Paris :Author
- Zuniar, Farida dan Mihammad Chamdani, (2017). Pengelolaan Kelas Yang Baik Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Kelas Inklusif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.